

KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENGELOLA INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

Niko Trisusilo, Emeraldy Chatra, Ernita Arif

Universitas Andalas Padang

nikotrisusilo@gmail.com, emerald1962@gmail.com, ernitaarif@soc.unand.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi komunikasi organisasi dalam mengelola informasi publik melalui media sosial di Polda Sumatera Barat dengan menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya studi kasus. Dengan menerapkan paradigma konstruktivisme, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik komunikasi organisasi di lembaga penegak hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan literatur yang relevan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif, yang melibatkan empat langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengelolaan informasi publik yang efektif melalui media sosial untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan citra institusi penegak hukum. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan praktik komunikasi organisasi di lembaga penegak hukum dan lembaga sejenis. Implikasi dari penelitian ini juga merangsang pemikiran untuk menyelidiki lebih lanjut strategi komunikasi yang lebih efektif dalam konteks yang berkembang pesat seperti media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan berharga tentang praktik komunikasi organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam konteks manajemen informasi publik di era digital saat ini.

Kata Kunci: *Komunikasi Organisasi, Informasi Publik, Media Sosial*

ABSTRACT

This study explores organizational communication in managing public information through social media at the West Sumatra Regional Police using a qualitative approach, specifically a case study. By applying the constructivism paradigm, this study aims to provide a comprehensive picture of organizational communication practices in law enforcement agencies. Primary data were obtained through interviews and direct observation, while secondary data were obtained from relevant documentation and literature. The data analysis technique used an interactive model, which involved four steps: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate the importance of effective public information management through social media to maintain public trust and improve the image of law enforcement institutions. The findings and recommendations of this study can serve as a foundation for improving and developing organizational communication practices in law enforcement agencies and similar institutions. The implications of this study also stimulate thinking to further investigate more effective communication strategies in a rapidly evolving context such as social media. Thus, this study not only provides valuable insights into organizational communication practices but also makes important contributions in the context of public information management in the current digital era.

PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi paling populer di era digital saat ini untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Peran media sosial dalam mengelola informasi publik, termasuk dalam konteks pelayanan publik, sangatlah penting. Polda Sumatera Barat juga memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Pengelolaan informasi publik melalui media sosial di Polda Sumatera Barat dilakukan oleh Divisi Hubungan Masyarakat (Bidhumas) yang bertanggung jawab atas pengelolaan, penyajian dan dokumentasi informasi yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, Bidhumas juga menjalin kerja sama, serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Namun, sementara tugas dan fungsi Bidhumas sangat penting, mereka juga menghadapi beberapa kelemahan dan tantangan. (Dupa et al., 2024.)

Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya peran Bidhumas dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di berbagai unit kerja di Polda, Sumatera Barat. Hal ini disoroti oleh Kepala Sub Bagian Manajemen Informasi dan Dokumentasi (PID) Polda Sumbar, yang menyatakan bahwa kurangnya anggaran untuk pelatihan tersebut mengakibatkan kurangnya kompetensi di antara PPID Satker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Tidak adanya pelatihan reguler telah menyebabkan kesenjangan kompetensi antara Bidhumas dan PID Satker di Polda, Sumatera Barat. Hal ini terlihat pada kegiatan liputan, dimana PPID unit kerja Polda Sumatera Barat sering meminta bantuan dari Bidhumas. Padahal, setiap unit kerja di lingkungan Polda Sumbar seharusnya memiliki PPID sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya banyak PPID unit kerja yang masih mengutamakan tugas perencanaan di atas tugas dan fungsi PPID. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya cakupan kegiatan terkait PPID dari unit kerja Polda Sumbar, terutama ketika beberapa kegiatan terjadi secara bersamaan dan jumlah sumber daya manusia di Bidhumas terbatas.

Polda Sumbar telah mengadopsi layanan keterbukaan informasi publik di era digital melalui Bidhumas Polda Sumbar dengan mengimplementasikan aplikasi berbasis website bernama SPIT (Integrated Information Service System). Aplikasi ini berperan sebagai media monitoring yang terintegrasi dengan Divisi Humas (Divhumas) Mabes Polri. SPIT memungkinkan pemantauan kegiatan PPID dari seluruh unit kerja, membedakan antara yang aktif dan pasif dalam mengelola informasi dan dokumen melalui media sosial.

Seluruh Satker PPID Polda Sumbar diwajibkan tidak hanya melaporkan kegiatannya melalui SPIT, tetapi juga mengelola informasi dan dokumen melalui media sosial yang terverifikasi seperti Facebook, Instagram, X, Youtube, Tiktok, dan portal website. Namun, saat ini hanya beberapa Satker yang telah memverifikasi akun media sosial, sementara yang lain masih tidak. Melalui media sosial, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memantau PPID Polda Sumatera Barat dan memberikan umpan balik. Namun, implementasi ini masih menghadapi kendala, seperti ego sektoral di antara unit kerja PPID dan fokus pada personal branding.

Bidhumas Polda Sumbar juga memantau PPID melalui grup WhatsApp, yang memungkinkan kegiatan PPID dapat dipantau. Namun, persoalan terkait alokasi anggaran untuk pelatihan dan pembinaan PPID masih ada, sehingga mengakibatkan sejumlah PPID tidak mendapatkan pelatihan intensif. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesiapan PPID dalam menghadapi situasi krisis, seperti yang terjadi dalam kasus pembubaran masyarakat di Air Bangis.

Polda Sumbar juga dihadapkan pada masalah pengelolaan akun media sosial yang belum terverifikasi dan kurangnya koordinasi dalam penggunaannya. Namun, sisi positifnya, anggota Polda Sumbar terlibat aktif dalam penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial, meski tidak semuanya terverifikasi. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah seperti pelatihan, manajemen SOP, dan peraturan yang lebih ketat perlu diterapkan. Selain itu, Bidhumas Polda Sumbar memiliki Sub Bagian Informasi Publik (Subbidpenmas) yang membantu mengelola informasi publik sebelum dipublikasikan. (Imadudin, Nuralia, dan Royyani, 2024) Dengan demikian, Bidhumas Polda Sumbar berperan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, pelayanan publik melalui

portal website Divhumas Polri, serta pengelolaan isu krisis media digital dan elektronik. Sementara media sosial telah membawa manfaat dalam penyampaian informasi publik, masih ada tantangan yang perlu ditangani, seperti pengelolaan akun yang tidak diverifikasi dan penanganan informasi yang tidak valid. Penting bagi Polda Sumatera Barat untuk menggunakan media sosial dengan kehati-hatian, transparansi, dan responsif terhadap umpan balik masyarakat untuk memperkuat komunikasi organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik.(pada dan 2024,)

Komunikasi memainkan peran penting dalam mengelola informasi publik secara efektif dalam konteks organisasi, seperti Polda Sumatera Barat. Dalam lembaga penegak hukum, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik, membangun legitimasi organisasi, dan melibatkan masyarakat dalam mendukung pekerjaannya. Bahkan sebelum era media sosial, lembaga penegak hukum telah mengakui pentingnya komunikasi strategis dengan media massa untuk membentuk persepsi publik tentang kejahatan dan mempertahankan citra polisi yang positif. (Studi, 2024) Dengan munculnya media sosial, lembaga penegak hukum memperoleh alat baru yang kuat untuk mengelola opini publik dan berinteraksi dengan masyarakat (Dengan meningkatnya pengakuan akan kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi organisasi melalui praktik distributif dan keadilan, telah ada unit hubungan masyarakat yang profesional dan terpusat untuk mengelola citra polisi). Media sosial telah menjadi bagian integral dari strategi komunikasi lembaga penegak hukum di seluruh dunia, termasuk Polda Sumatera Barat.

Negara menjamin hak asasi manusia dalam kaitannya dengan memperoleh informasi. Salah satu indikator negara demokratis adalah kemampuan rakyatnya untuk menyuarakan ide dan pendapat mereka, terlibat dalam pembangunan, melakukan kontrol sosial, dan memperoleh informasi yang cepat, akurat dan benar. Berdasarkan UUD 1945, pemerintah telah membuat undang-undang yang lebih spesifik, seperti UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan informasi publik.

Dalam konteks ini, hubungan masyarakat adalah lembaga vital dalam

pemerintahan. (Hidayat, et.al, 2024) Kinerja pemerintah yang kondusif tidak terlepas dari peran humas dalam merancang dan mengelola informasi untuk menjalin komunikasi dua arah dengan berbagai pihak, komunitas, dan latar belakang lainnya. Humas, sebagai penghubung, juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada pimpinan mengenai kebijakan dan rencana kerja, dan presensi harus menanggapi saran dari humas. Jalannya pemerintahan yang harmonis dapat terganggu jika tidak ada koordinasi yang baik antara keduanya. Membangun citra positif pemerintah adalah tugas utama humas. Hamad menjelaskan bahwa komunikasi dua arah lebih efektif daripada komunikasi satu arah, dan itulah peran humas dalam membangun komunikasi dan menyampaikan informasi dengan baik.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Tri Widyasari et al (2017), telah mengakui pentingnya media sosial dalam komunikasi organisasi dan manajemen informasi publik. Selain itu, studi lain tentang penggunaan media sosial dalam public relations juga menyoroti pentingnya media sosial dalam meningkatkan citra dan reputasi organisasi (Haryanti & Rusfian, 2018). Studi lain oleh Waters & Tindall (2010) menunjukkan penggunaan media sosial dalam manajemen krisis dan partisipasi dan transparansi melalui penerapan praktik e-government. Namun, penelitian oleh Gruda & Ojo (2022) menemukan adanya kesenjangan komunikasi ketika memanfaatkan media sosial dalam komunikasi krisis. Mereka menemukan bahwa penanganan komunikasi krisis yang tidak tepat di media sosial dapat merusak reputasi organisasi. Studi oleh Meerman & Van Reijmersdal juga menemukan bahwa kecemasan dalam komunikasi krisis organisasi dapat memprediksi kecemasan publik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai komunikasi organisasi dalam mengelola informasi publik melalui media sosial di Polda Sumatera Barat. Komunikasi organisasi adalah kunci dalam manajemen untuk mengatasi dinamika kelompok dalam mencapai tujuan. Selain komunikasi organisasi, unsur-unsur lain seperti kepemimpinan yang kuat, standar dan prosedur operasional, perencanaan, organisasi, kegiatan, kontrol, dan evaluasi juga terlibat dalam manajemen. Dalam sebuah lembaga, khususnya lembaga komunikasi massa, komunikasi organisasi merupakan mata

rantai yang tidak boleh putus dalam membangun suatu sistem untuk mencapai tujuan. Keberhasilan manajemen, terutama manajemen baru, sangat ditentukan oleh kekuatan komunikasi organisasi antara elemen, kelompok dan individu di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi kasus dan bersifat deskriptif. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang komunikasi organisasi dalam mengelola informasi publik melalui media sosial di Polda Sumatera Barat. Paradigma konstruktivisme yang digunakan menekankan pada analisis sistematis tindakan sosial yang bermakna melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan literatur yang relevan. Informan penelitian dipilih secara purposif berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif, yang terdiri dari empat langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman pentingnya komunikasi organisasi dalam mengelola informasi publik melalui media sosial di Polda Sumatera Barat. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan praktik komunikasi organisasi di lembaga penegak hukum dan lembaga serupa lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi polisi di Sumatera Barat melalui media sosial

Media sosial telah menjadi saluran komunikasi utama Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menyebarkan berbagai jenis informasi publik kepada masyarakat. Salah satu jenis informasi yang rutin disampaikan melalui platform media sosial adalah pengumuman kegiatan polisi. (Rahayu et al., 2020a) Ini termasuk informasi terkait operasi keamanan, patroli rutin, dan kegiatan penegakan hukum lainnya yang sedang atau akan dilaksanakan oleh

polisi.(Sari et al., 2021) Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat juga menggunakan media sosial untuk memberikan notifikasi tentang peristiwa penting yang terjadi di wilayah hukumnya. Ini dapat mencakup laporan kecelakaan lalu lintas, kebakaran, atau insiden lain yang memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan atau kesejahteraan masyarakat.(Yulianti, 2018) Tujuannya adalah untuk memberikan informasi secara real-time kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang tepat jika terlibat dalam situasi tersebut.

Informasi pelayanan publik juga sering disebarluaskan melalui media sosial oleh Polda Sumatera Barat. Ini termasuk panduan membuat laporan kehilangan properti, prosedur aplikasi lisensi, atau informasi tentang layanan bantuan darurat yang dapat diakses oleh publik.(Dewi, 2012) Dengan memberikan informasi ini secara online, polisi dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan yang mereka butuhkan.

Media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan edukasi sosial kepada masyarakat. Informasi tentang pencegahan kejahatan, keselamatan lalu lintas, dan saran untuk menjaga diri dan harta benda seseorang tetap aman sering disampaikan melalui konten pendidikan yang diposting oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi risiko dan memberi mereka pengetahuan yang berguna untuk melindungi diri dan lingkungannya. Menurut Dwisulistyan, divisi humas agar informasi ini dapat merangkum semua kegiatan mulai dari Kapolri, ya pimpinan kepolisian hingga kegiatan di satker mabes kepolisian sampai ke levelnya, jadi ini memang strategi, yaitu karena situasi saat ini menuntut kita juga mengikuti perkembangan zaman sehingga ya strategi ini sangat strategis dan untuk membuat akun, baik instagram, website, facebook, maka Tik tok nah semua akun yang kita miliki kita buat jadi ini selain memberikan informasi kita juga menerima informasi dari masyarakat lebih cepat ya karena banyak orang yang tergabung dalam media sosial sehingga kita juga sering mendapatkan informasi dari masyarakat.

Polda Sumatera Barat telah memanfaatkan berbagai platform media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi publik kepada masyarakat. Salah satu platform yang

paling sering digunakan adalah Facebook, di mana mereka memposting informasi terkait kegiatan operasional, program pencegahan kejahatan, dan layanan polisi lainnya. Twitter juga merupakan platform penting bagi mereka, di mana mereka dapat memberikan informasi cepat dan ringkas tentang perkembangan terbaru, serta mendidik masyarakat tentang langkah-langkah keamanan. Instagram juga digunakan untuk berbagi foto yang mendokumentasikan kegiatan, video pendek, dan cerita menarik terkait keterlibatan polisi dalam berbagai kegiatan sosial. (Rauf et al., 2020.)

YouTube adalah platform lain yang digunakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat, di mana mereka mempublikasikan video liputan kegiatan, rekaman pelatihan, dan materi pendidikan yang berkaitan dengan hukum dan keamanan. LinkedIn juga digunakan sebagai platform untuk berbagi informasi profesional, seperti rekrutmen, profil petugas polisi, dan program kerja sama dengan institusi atau perusahaan lain. Selain itu, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp juga digunakan untuk memberikan layanan komunikasi yang lebih langsung kepada masyarakat, seperti keluhan atau pertanyaan pribadi. (Randan & Randan, 2022) Menurut Sahman, kami melakukan pelatihan cara membuat dan mengedit video, membuat narasi, lalu cara menyebarkan informasi melalui media sosial. Ada pelatihan terpusat yang dilakukan oleh biro SDM kemudian menunjuk narasumber dari humas. Untuk tahun ini sekali dan tahun lalu kami telah melakukannya sekali. Jadi kami memberikan pelatihan kepada semua jajaran.

Tidak hanya itu, Polda Sumatera Barat juga memanfaatkan platform media sosial berbasis video pendek seperti TikTok dan Snapchat untuk membuat konten yang lebih kreatif dan menghibur, terutama untuk menjangkau remaja dan milenial. (Nofrima, et.al, 2020) Menurut Novita Sarli, Biro SDM memposting sehingga semua yang ada di Instagram, Twitter, Facebook di Situs Web diposting. Semua platform ini adalah bagian dari strategi komunikasi holistik, yang memungkinkan polisi untuk terhubung secara lebih langsung dan efektif dengan masyarakat melalui media sosial. Dengan memanfaatkan platform ini, Polda Sumatera Barat dapat menjangkau lebih banyak orang dan menyampaikan pesan-pesan penting dengan cara yang menarik dan mudah dicerna.

Polda Sumatera Barat telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengelola informasi publik melalui media sosial dengan strategi engagement yang efektif. Dengan menanggapi pertanyaan dan umpan balik masyarakat dengan cepat, menyelenggarakan sesi tanya jawab terbuka, dan menyediakan konten pendidikan, kepolisian memperkuat hubungan dengan masyarakat sambil meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi mereka.(Barnett & Jung, 2020)

Melalui kegiatan masyarakat dan kampanye kesadaran, polisi juga membangun hubungan sosial yang erat dengan masyarakat, menciptakan lingkungan di mana partisipasi publik dalam upaya keamanan menjadi lebih layak.(Aprilia et al., 2020) Secara keseluruhan, interaksi melalui media sosial bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang positif dan saling percaya antara polisi dan masyarakat.(Idroos et al., n.d.) Strategi komunikasi organisasi Polda Sumatera Barat dalam mengelola informasi publik melalui media sosial telah membuka jalan bagi dialog yang lebih terbuka, transparan, dan berkelanjutan antara polisi dan masyarakat.(Wandi & Reflianto, 2018) Dengan terus memperkuat interaksi ini, kepolisian dapat lebih efektif dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi seluruh warga negara.

Efektivitas strategi komunikasi

Tingkat penjangkauan informasi publik melalui media sosial merupakan salah satu aspek terpenting dari strategi komunikasi sebuah organisasi, khususnya bagi Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Jangkauan ini mengukur seberapa luas pesan atau konten yang disebarluaskan oleh polisi dapat menjangkau audiensnya. Semakin besar jangkauan informasi, semakin banyak orang yang dapat dijangkau dan terhubung dengan informasi yang disampaikan oleh polisi. Hal ini krusial karena tujuan utama komunikasi publik adalah menyampaikan pesan-pesan penting kepada publik secara luas dan efektif.(Jurnal S, 2024)

Peningkatan jangkauan informasi dapat dicapai melalui berbagai strategi dan teknik.(Nct, 2020)Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik search engine optimization (SEO) untuk memastikan bahwa konten yang diposting oleh polisi mudah ditemukan oleh pengguna internet ketika mereka mencari informasi terkait. Selain itu, kepolisian juga dapat

memanfaatkan metode promosi berbayar di platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas konten mereka ke khalayak yang lebih luas. Kolaborasi dengan influencer atau komunitas yang relevan juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih besar. (Nazarova, 2020) Dengan memperluas jangkauan informasi, kepolisian dapat memastikan bahwa pesan penting tentang keamanan, penegakan hukum, dan layanan publik lainnya menjangkau sebanyak mungkin orang. Hal ini penting untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat tentang peran dan tugas polisi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah mereka. (Jordan et al., 2021) Menurut Alganik, semua media sosial di HR khususnya dan dalpers sumbar dijadikan kelompok yang menjadi ketua pesi kabag sebagai tim media sosial. Nantinya, ketua panitia akan mengirimkannya kepada ketua HR sebagai penanggung jawab setiap konten di HR sebelum diposting, kami laporkan terlebih dahulu apakah pantas untuk diposting atau tidak atau setelah diposting, semua link akan dikumpulkan dan dilaporkan ke grup yang dipantau oleh ketua panitia dan kemudian diteruskan ke biro SDM.

Menganalisis data tentang tingkat jangkauan informasi publik juga penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi. Dengan memantau seberapa jauh pesan menyebar dan berapa banyak orang yang terlibat, kepolisian dapat menilai seberapa efektif upaya komunikasi mereka dan mengidentifikasi area di mana mereka perlu melakukan perbaikan atau penyesuaian. (Alqahtani et al., 2021) Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang dan melaksanakan strategi komunikasi masa depan.

Tingkat keterlibatan masyarakat merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas komunikasi organisasi, khususnya bagi Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengelola informasi publik melalui media sosial. Keterlibatan mencakup berbagai interaksi yang dilakukan oleh komunitas terhadap konten yang disebarluaskan, seperti suka, berbagi, komentar, dan reaksi lainnya. Semakin tinggi tingkat engagement, semakin besar dampak dan efektivitas pesan yang disampaikan. (Saputra et al., 2024.) Dalam mengukur tingkat engagement, polisi dapat memperhatikan berbagai faktor, termasuk jumlah like, komentar, dan share pada setiap postingan yang dipublikasikan. Analisis sentimen juga dapat dilakukan

untuk memahami bagaimana orang menanggapi konten, apakah itu positif, netral atau negatif. (Kushendar et al., 2021) Menurut Gupuh Setiyono, program prioritas kepolisian merupakan 16 prioritas Kapolri yang telah disebutkan sebelumnya, salah satunya tentang penataan kelembagaan, kedua untuk perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM unggul di era kepolisian 4.0, keempat adalah perubahan teknologi kepolisian. Hal ini memungkinkan kepolisian untuk mengetahui sejauh mana konten mereka telah berhasil menarik perhatian dan minat publik.

Tingkat engagement yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa konten yang disajikan relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini juga mencerminkan tingkat keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai inisiatif atau program yang dicanangkan oleh polisi. Dengan demikian, tingkat keterlibatan dapat menjadi indikator keberhasilan dalam membangun hubungan yang kuat antara polisi dan masyarakatnya. Tingkat engagement yang tinggi juga dapat menciptakan efek domino, di mana konten yang mendapat respon positif cenderung lebih luas melalui berbagai interaksi dan share. Ini secara efektif meningkatkan visibilitas dan dampak pesan yang disampaikan oleh kepolisian, memungkinkan mereka menjangkau khalayak yang lebih luas dan memperkuat keterlibatan masyarakat. (Tarigan et al., 2024.)

Penting bagi pasukan polisi untuk terus memantau dan menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari evaluasi rutin strategi komunikasi mereka. Dengan memahami bagaimana publik menanggapi konten mereka, kepolisian dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pendekatan komunikasi mereka dan melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi mereka melalui media sosial.

Persepsi publik terhadap Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumatera Barat) melalui media sosial merupakan indikator vital dalam menilai efektivitas komunikasi organisasi. Persepsi ini mencakup pandangan, pendapat, dan penilaian publik terhadap berbagai kegiatan, kebijakan, dan kinerja kepolisian yang disajikan melalui platform media sosial. Melalui media sosial, masyarakat memiliki akses langsung untuk mengekspresikan pandangannya tentang berbagai isu dan peristiwa yang melibatkan kepolisian. Ini

memberikan kesempatan bagi polisi untuk memahami bagaimana mereka dipandang oleh masyarakat secara keseluruhan, serta untuk mengetahui isu-isu yang dianggap penting oleh publik.

Persepsi publik terhadap polisi dapat tercermin dalam tanggapan yang diberikan terhadap konten yang diposting oleh akun polisi resmi di media sosial. Tanggapan positif, seperti komentar yang mendukung atau reaksi yang menguntungkan, dapat menunjukkan bahwa publik memiliki pandangan positif terhadap kinerja dan inisiatif polisi. (Mtange, 2022) Sebaliknya, tanggapan negatif, seperti komentar kritis atau reaksi yang tidak menguntungkan, dapat mengindikasikan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan publik terhadap polisi. (Bris et al., 2021) Analisis sentimen juga merupakan alat penting untuk lebih memahami bagaimana publik menanggapi konten yang disampaikan oleh polisi.

Sentimen positif mencerminkan dukungan dan kepercayaan, sedangkan sentimen negatif menunjukkan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan. Informasi ini dapat memberikan masukan berharga bagi kepolisian untuk meningkatkan kinerja mereka dan memperkuat hubungan masyarakat. (Jordan et al., 2021) Persepsi masyarakat terhadap polisi juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan keterlibatan dalam berbagai program atau inisiatif yang dicanangkan oleh polisi. Dengan memperhatikan dan menanggapi umpan balik masyarakat secara positif, polisi dapat memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat dan meningkatkan citra mereka di mata publik. (Oktaviane et al., 2023.)

Peluang dan tantangan dalam mengelola informasi publik melalui media sosial

Kesempatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui media sosial merupakan aspek penting dalam konteks komunikasi organisasi Regional Sumatera Barat. Dengan media sosial, polisi memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat transparansi dalam tindakan dan keputusan mereka kepada publik. (Yusmanizar et al., 2023.) Mereka dapat langsung berbagi informasi tentang kegiatan operasional, kebijakan, serta hasil dari berbagai tindakan penegakan hukum yang diambil. Media sosial memungkinkan polisi untuk secara proaktif menanggapi pertanyaan, kekhawatiran, atau umpan balik yang diajukan oleh publik. Dengan memberikan jawaban dan penjelasan yang jelas melalui platform media sosial, polisi dapat membuka saluran komunikasi yang lebih terbuka dan transparan dengan publik. (Rauf

et al., 2020.) Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan dan kebijakan kepolisian. Media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempublikasikan laporan kinerja dan hasil evaluasi yang membahas pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh polisi.

Kepolisian dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap akuntabilitas publik dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Untuk memanfaatkan peluang ini secara efektif, diperlukan juga langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui media sosial akurat, transparan, dan dapat dipercaya. (Sani SSos et al., 2022) Kepolisian harus memastikan bahwa staf yang bertanggung jawab atas manajemen media sosial terlatih dengan baik dan memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan etika digital. (Rahmi et al., 2020.) Selain itu, mekanisme umpan balik masyarakat juga harus dibentuk untuk memastikan bahwa kekhawatiran atau pertanyaan yang diajukan dapat dijawab secara tepat waktu dan memadai. Dengan demikian, polisi dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. (Jurakulovna et al., 2022)

Tantangan penanganan misinformasi dan disinformasi melalui media sosial menjadi fokus penting bagi Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menjalankan komunikasi organisasinya. Media sosial menyediakan platform yang mudah untuk penyebaran informasi yang tidak akurat, bias, atau bahkan menyesatkan. Tantangan utama bagi polisi adalah bagaimana mereka dapat secara efektif memerangi dan mengurangi dampak negatif dari misinformasi dan disinformasi ini. (Zheng, 2023) Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan polisi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat. Melalui kampanye konseling dan edukasi, polisi dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka terima di media sosial. Ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas tentang cara mengidentifikasi berita palsu atau informasi yang tidak akurat, serta konsekuensi hukum dari penyebaran informasi yang menyesatkan. (Nofrima, et.al 2020)

Polisi perlu mengembangkan kemampuan untuk memantau dan merespons dengan cepat informasi menyesatkan yang muncul di media sosial. Ini dapat melibatkan pembentukan

tim atau unit khusus yang bertugas mengawasi konten yang diposting secara online dan merespons dengan cepat jika informasi berbahaya atau palsu terdeteksi. Penting untuk dicatat bahwa respons yang cepat dan tepat waktu dapat membantu mengurangi dampak negatif dari misinformasi dan disinformasi. (Mursyida et al., 2022.) Kerja sama antara kepolisian, platform media sosial, dan pihak lain seperti LSM atau lembaga pemerintah juga penting dalam menangani masalah misinformasi dan disinformasi. (Machmud et al., 2021.) Dengan bekerja sama, mereka dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mendeteksi, melacak, dan menanggapi konten berbahaya yang muncul di media sosial. Ini juga termasuk berbagi informasi dan koordinasi tindakan untuk melawan ancaman yang muncul. Tantangan terus muncul dalam menanggulangi misinformasi dan disinformasi, tetapi dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, serta peningkatan kesadaran masyarakat, Kepolisian Sumatera Barat dapat memainkan peran penting dalam menangani masalah ini secara efektif.

Membangun kepercayaan masyarakat melalui media sosial merupakan tantangan utama yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumatera Barat). Kepercayaan masyarakat adalah dasar dari hubungan yang sehat antara polisi dan publik, dan media sosial menyediakan platform yang kompleks untuk membangun dan memelihara kepercayaan ini. (Hadiningrat, et al., 2022) Salah satu tantangan dalam membangun kepercayaan adalah ketidakpastian yang sering dikaitkan dengan informasi yang disebarluaskan melalui media sosial. Dalam lingkungan di mana informasi dapat dengan cepat menyebar tanpa verifikasi yang memadai, publik sering meragukan kebenaran dan keandalan informasi yang mereka terima. (Lestari et al., 2019.) Oleh karena itu, penting bagi polisi untuk berkomunikasi secara transparan dan memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan kepada publik.

Persepsi negatif terhadap institusi kepolisian atau pengalaman buruk sebelumnya dengan aparat kepolisian juga dapat menjadi kendala dalam membangun kepercayaan publik melalui media sosial. (Brajawidagda, 2016) Untuk mengatasi hal ini, kepolisian perlu melakukan upaya konkret untuk meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan keterbukaan mereka kepada publik. (Tarigan et al., 2024) Ini dapat melibatkan penerapan kebijakan progresif, menegakkan standar etika yang tinggi, dan berpartisipasi dalam dialog terbuka dengan masyarakat.

Tantangan lain dalam membangun kepercayaan adalah bersaing dengan narasi atau opini yang berlawanan yang mungkin muncul di media sosial. Masyarakat sering dihadapkan pada berbagai sudut pandang dan pendapat, yang dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang polisi. Oleh karena itu, penting bagi pasukan polisi untuk berkomunikasi secara konsisten, jelas dan terbuka untuk memastikan bahwa pesan mereka tidak terdistorsi atau dikaburkan oleh narasi yang saling bertentangan. (Imadudin et al., 2024)

Kepolisian juga perlu membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan masyarakat di media sosial. Ini termasuk secara aktif terlibat dalam dialog dengan publik, menanggapi dengan cepat pertanyaan atau masalah, dan mengambil tindakan konstruktif untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul. (Carley et al., 2016.) Dengan demikian, polisi dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat dan secara bertahap membangun kepercayaan yang kuat. Meskipun tantangan dalam membangun kepercayaan publik melalui media sosial sangat banyak, Polda Sumatera Barat dapat mengatasinya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan, kepolisian dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat dan membangun fondasi yang kuat untuk kepercayaan yang berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam mengelola informasi publik melalui media sosial

Kualitas konten informasi publik yang disebarluaskan melalui media sosial merupakan faktor krusial dalam menarik perhatian dan membangun kepercayaan publik terhadap Polda Sumatera Barat. Konten yang informatif, relevan dan berkualitas dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disajikan. (Aunul, et.al, 2023) Oleh karena itu, polisi harus memastikan bahwa konten yang dipublikasikan melalui media sosial memiliki akurasi, kejelasan, dan kedalaman yang memadai. (Chatfield et al., 2013.) Kreativitas dalam penyampaian konten juga menjadi faktor penting dalam menarik minat publik. Penggunaan gambar, video, infografis dan konten multimedia lainnya dapat memperkaya pengalaman pengguna dan membuat informasi lebih mudah dipahami dan diingat. Dengan demikian, polisi dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kunci dan mengkomunikasikan informasi yang kompleks kepada publik. (Jannah et al., 2020.)

Kemampuan Polda Sumatera Barat dalam menggunakan media sosial menjadi faktor penentu keberhasilan komunikasi organisasi mereka dalam mengelola informasi publik. Keterampilan dalam mengelola akun media sosial, menghasilkan konten yang relevan, dan berinteraksi dengan publik secara efektif sangat penting. Kepolisian harus memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan platform media sosial dan memanfaatkan fitur-fiturnya secara optimal. Selain kemampuan teknis, pemahaman tentang tren dan dinamika media sosial juga merupakan kunci.

Polisi perlu memahami bagaimana algoritma platform media sosial tertentu bekerja, topik yang sedang tren, dan perilaku serta preferensi pengguna media sosial. Dengan pemahaman ini, mereka dapat merancang strategi komunikasi yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuannya. (Asia, 2008) Kemampuan untuk mengelola krisis dan menangani situasi mendesak juga diperlukan. Aparat kepolisian harus siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul di media sosial, seperti krisis reputasi, penyebaran informasi palsu, atau kritik tajam dari masyarakat. (Rahayu et al., 2020) Mereka perlu memiliki rencana kontinjensi yang terperinci dan tim terlatih untuk merespons dengan cepat dan tepat dalam situasi seperti itu. Kolaborasi antar-unit dalam kepolisian juga penting. Dalam mengelola informasi publik melalui media sosial, berbagai unit di kepolisian dapat terlibat dalam menghasilkan konten, memantau tanggapan masyarakat, dan menjalankan strategi komunikasi. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama antar unit diperlukan untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dalam pesan yang disampaikan kepada publik.

Kemampuan beradaptasi dan inovasi juga merupakan aspek penting. Media sosial terus berkembang dan berubah, sehingga polisi perlu terus mengikuti perkembangan tersebut dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Mereka juga perlu berinovasi dalam menyajikan konten dan strategi komunikasi agar tetap relevan dan efektif dalam menjangkau publik melalui media sosial. (Rahayu et al., 2020a)

Karakteristik masyarakat pengguna media sosial merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumatera Barat) dalam mengelola informasi publik. (Adhikarya, 2008) Berbagai faktor seperti demografi, preferensi konten, dan perilaku online mempengaruhi cara orang berinteraksi

dengan konten yang disajikan oleh polisi melalui media sosial. (Pada & 2024, n.d.) Salah satu karakteristik yang mempengaruhi adalah demografi pengguna media sosial. Usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lokasi geografis pengguna dapat memengaruhi minat dan preferensi mereka terhadap konten yang disajikan. Pasukan polisi perlu memahami demografi audiens mereka untuk mengkurasi konten yang relevan dan menarik bagi beragam kelompok orang. (Yulinasril et al., 2019)

Preferensi konten juga merupakan faktor penting. Setiap individu memiliki minat dan preferensi yang berbeda dalam konten yang mereka konsumsi di media sosial. Beberapa mungkin lebih tertarik pada konten informatif seperti informasi keamanan dan penegakan hukum, sementara yang lain mungkin lebih suka konten hiburan atau inspirasional. Polisi perlu memahami preferensi ini untuk membuat konten yang menarik dan relevan dengan masyarakat. (Idroos et al., 2023.) Perilaku online juga merupakan karakteristik penting untuk dipertimbangkan. Beberapa pengguna media sosial mungkin lebih aktif dalam berpartisipasi dalam diskusi atau menyebarkan informasi, sementara yang lain lebih pasif dalam mengonsumsi konten tanpa berinteraksi secara langsung. Polisi perlu memahami perilaku online ini untuk merancang strategi komunikasi yang tepat dan efektif dalam berinteraksi dengan publik.

Tingkat literasi digital dan kepercayaan terhadap informasi juga memengaruhi cara orang menanggapi konten yang disajikan oleh polisi. (Saputra et al., 2024.) Publik yang lebih terampil secara digital mungkin lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima dan lebih mampu memilah apa yang akurat dari apa yang tidak. Oleh karena itu, polisi perlu memperhatikan tingkat literasi digital dan membangun kepercayaan dengan menyediakan konten yang akurat dan bermanfaat. Dengan memperhatikan karakteristik komunitas pengguna media sosial ini, Kepolisian Daerah Sumatera Barat dapat mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan menjangkau audiens sasarannya dengan lebih baik melalui platform media sosial

SIMPULAN

Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama untuk mengelola informasi publik. Melalui berbagai platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, mereka menyebarkan berbagai jenis informasi kepada publik, mulai dari pengumuman acara hingga saran keselamatan. Interaksi aktif terjadi antara polisi dan masyarakat melalui media sosial, di mana mereka secara langsung menanggapi pertanyaan, komentar, dan umpan balik dari publik. Ini membantu menciptakan saluran komunikasi dua arah yang efektif, memungkinkan polisi untuk mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat secara langsung. Efektivitas strategi komunikasi mereka terlihat dari jangkauan informasi publik yang luas, tingkat keterlibatan yang tinggi dari masyarakat, dan persepsi positif terhadap kinerja polisi. Namun, ada tantangan yang harus diatasi, seperti penyebaran informasi yang salah dan disinformasi di media sosial. Selain itu, membangun kepercayaan publik juga penting, mengingat pentingnya dukungan dan kerja sama publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi, Kepolisian Daerah Sumatera Barat perlu memperhatikan kualitas konten informasi publik yang disebarluaskan, memastikan informasi yang disampaikan akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh publik. Mereka juga perlu terus meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan media sosial, memanfaatkan fitur-fitur baru dan belajar tentang tren terbaru di media sosial. Selanjutnya, upaya penanganan misinformasi dan disinformasi perlu diperkuat dengan memberikan informasi yang jelas dan faktual kepada publik. Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut, Polda Sumatera Barat dapat mempererat hubungan dengan masyarakat melalui media sosial, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adhikarya, R. (2008). Tantangan untuk Komunikasi dan Jaringan Sosial di Dunia Datar: Manajemen Pengetahuan "Diam-diam" dan Berbagi untuk Masyarakat Berbasis K. *Media Asia*, 35(4), 259–268. <https://doi.org/10.1080/01296612.2008.11771966>

- Alqahtani, N. N., Al Rawashdeh, A. Z., Al Arab, A. R., & Aldoy, M. I. (2021). Sebuah studi sosiologis untuk fakta kreativitas perempuan dalam masyarakat Arab: perempuan Saudi sebagai model. *Jurnal Aplikasi dan Probabilitas Statistika*, 9. <https://doi.org/10.18576/JSAP/09S101>
- Aprilia, B., Maria Surya, F., & Svarna Pertiwi, M. (2020). Analisis Pergeseran Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminitas dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan. *Jurnal Sentris*, 1(2). <https://doi.org/10.26593/sentris.vii2.4294.91-108>
- Asia, R. A.-M., & 2008, tidak terdefinisi. (n.d.). Tantangan untuk Komunikasi dan Jaringan Sosial di Dunia Datar: "Diam-diam" Manajemen Pengetahuan dan Berbagi untuk Masyarakat Berbasis K. *Taylor & Fransiskus*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01296612.2008.11771966>
- Aunul, S., Coresspondence, *, & Hatika, M. (2023). Pengaruh Website dan Facebook terhadap citra Perguruan Tinggi swasta di Provinsi Riau (Cyber Public Relations Survey). *Theparagraphs.Org*. <https://doi.org/10.59260/pcommu.2023.1006>
- Barnett, W. S., & Jung, K. (2020). Memahami dan menanggapi dampak pandemi pada pendidikan prasekolah: Apa yang bisa kita pelajari dari musim semi lalu. *Institut Nasional untuk Penelitian Pendidikan Dini ...*, Juli.
- Brajawidagda, U. (2016). *Penciptaan nilai publik melalui jaringan media sosial: Penelitian metode campuran pada lembaga penanggulangan bencana di Indonesia*. <https://ro.uow.edu.au/theses/4690/>
- Bris, A., Wang, T. Y. H., Zatzick, C.D., Miller, D. J. P., Fern, MJ, Kardinal, L. B., Gregoire, DA, Gembala, DA, Westphal, JD, Shani, G., Troster, C., Van Quaquebeke, N., Lanaj, K., Hollenbeck, JR, Ilgen, DR, Barnes, CM, Harmon, SJ, Feldman, ER, DesJardine, MR, ... Sangiorgi, F. (2021). KSATRIA, PERAMPOK, DAN TARGET - DAMPAK DARI PENGAMBILALIHAN YANG BERMUSUHAN - KOPI, JC, LOWENSTEIN, L, ROSEACKERMAN, S. *JURNAL PERBANKAN & KEUANGAN*, 37(1).
- Carley, K., Malik, M., Landwehr, P., sains, J. P.-S., & 2016, tidak terdefinisi. (n.d.). Manajemen bencana crowdsourcing: Sifat kompleks penggunaan Twitter di Padang Indonesia. *Elsevier*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516300431>
- Chatfield, A., ... Konferensi U. B. pada, & 2013, tidak terdefinisi. (n.d.). Sistem peringatan dini tsunami Twitter: Studi kasus dalam manajemen bencana alam Indonesia. *Ieeexplore.Ieee.Org*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6480088/>
- Dewi, K. H. (2012). Kepemimpinan Perempuan dan Demokratisasi dalam Politik Lokal sejak 2005: Tren, Prospek, dan Refleksi di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 38(2).
- Dupa, H., Ansofino, A., Jurnal, I. I.-I., & 2024, tidak terdefinisi. (n.d.). Strategi Kelompok Sadar Pariwisata dalam Memperkuat Aksi Kolektif dan Modal Sosial untuk Pengembangan Pariwisata Kota Padang. *Ejournal.Ipinternasional.Com*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/ijere/article/view/768>

- Hadiningrat, W., ... K. W.--J. H. dan S., & 2022, tidak terdefinisi. (2022). Mengelola Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia. *Researchgate.Net*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6043>
- Hidayat, M., Ekonomi, N. N.-J., & 2024, tidak terdefinisi. (2024). Mengenal Lebih Dekat "The Power of Mama", Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat dan Pahlawan Perempuan untuk Hutan Kalimantan Indonesia. *Ejournal.Seaninstitute.or.Id*, 13. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i01>
- Idroos, B., Nurdin, N., Labolo, M., & Averus, A. (n.d.). EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ANTARA KPU DAN DKPP: STUDI KASUS PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KPU. *Lgjdxcn.Asia*. Diakses tanggal April 6, 2024, from https://lgjdxcn.asia/admin/pdf_files/V181001-2024.pdf
- Imadudin, I., Nuralia, L., & Royyani, M. (2024). *Antara Harapan dan Realitas Revolusi: Gerakan Baso di Sumatera Barat, Indonesia, 1946 dari Perspektif Teori Perilaku Kolektif*. https://isvshome.com/pdf/ISVS_11-01/ISVSej_11.01.12.pdf
- Jannah, L., ... M. S.-P. & G., & 2020, tidak terdefinisi. (n.d.). Keterbukaan informasi publik: memetakan pemahaman berbagai aktor di provinsi-provinsi Indonesia yang rawan korupsi. *Journal.Iapa.or.Id*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <http://www.journal.iapa.or.id/pgr/article/view/321>
- Jordan, S., Domanska, O., & Loer, A. (2021). Literasi kesehatan generik remaja di Jerman: Hasil survei cross-sectional nasional. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Eropa*, 31(Supplement_3). <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab164.142>
- Jurnal, S. S.-T. S. S., & 2024, tidak terdefinisi. (n.d.). Komunikasi publik untuk penanganan Hoax tentang vaksin Covid-16: Analisis konten di media sosial resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia. *Techniumscience.Com*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/10636>
- Jurakulovna, T. M., Shavkatovna, R. G., Xakimovna, G. D., & Zoirovna, J. S. (2022). ORGANISASI PROSES PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN PRASEKOLAH BERDASARKAN PENDEKATAN YANG BERPUSAT PADA SISWA. *JURNAL INTERNASIONAL PENDIDIKAN KHUSUS ANAK USIA DINI*, 14(3).
- Kushendar, D. H., Rusli, B., Muhtar, E. A., & Candradewini. (2021). Pengelolaan Perumahan Rakyat: Tinjauan Kebijakan Rusunawa Di Kota Cimahi, Indonesia. *Jurnal Akademi Manajemen Strategis*, 20(5).
- Lestari, P., Komunikasi, R. K.-... J. of, & 2019, tidak terdefinisi. (n.d.). Penggunaan kearifan lokal (purpusage) melalui komunikasi dari hati ke hati dalam penyelesaian konflik sosial di Karo, Sumatera Utara Indonesia. *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41924/>
- Machmud, M., Irawan, B., Karinda, K., ... J. S.-A. J. dari, & 2021, tidak terdefinisi. (n.d.). Analisis intensitas komunikasi dan koordinasi pejabat pemerintah di media sosial twitter selama penanganan Covid-19 di Indonesia. *Academia.Edu*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <https://www.academia.edu/download/79202575/12073.pdf>
- Mtange, M. (2022). MENGELOLA IDENTITAS PERUSAHAAN SELAMA TRANSFORMASI ORGANISASI DI LEMBAGA PUBLIK DI KENYA. *Jurnal Internasional Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, 7(1). <https://doi.org/10.47604/ijcpr.1564>

- Mursyida, S., KURIOSITAS, M. S.-, & 2022, tidak terdefinisi. (n.d.). Strategi Komunikasi Direktorat Narkotika Polres Sumatera Utara dalam Upaya Pemberantasan Narkoba. *Repository.Uinsu.Ac.Id*, 15(2), 159–172. Diakses tanggal April 6, 2024, from <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/20018>
- Nazarova, Z. (2020). Organisasi proses permainan pembelajaran dalam sistem pendidikan prasekolah. *JurnalNX*, 6(10).
- Nct. (2020). Insufisiensi jantung Brasil dengan telemedicine. <https://Clinicaltrials.Gov/Show/NCT04466852>.
- Nofrima, S., Nurmandi, A., & DEWI, D. S. K. (2020). *Aktivisme siber tentang penyebaran #Gejayanmemanggil: gerakan mahasiswa Yogyakarta*. <http://eprints.umpo.ac.id/5279/1/10%20P-artikel.pdf>
- Oktaviane, D., Bila, A., Konferensi, W. A.-I. P., & 2023, tidak terdefinisi. (n.d.). Peran Sistem Informasi Manajemen Publik dalam Organisasi Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang. *Ipa.or.Id*. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2023.898>
- pada, H. S.-P. dari I. C., & 2024, tidak terdefinisi. (n.d.). Dampak ujaran kebencian terhadap dakwah Jamah Tabligh di media sosial. *Jurnal.Serambimekkah.Ac.Id*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <http://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/icmr/article/view/1290>
- Rahayu, H. P., Kenyamanan, L. K., Haigh, R., Amaratunga, D., & Khoirunnisa, D. (2020a). Sebuah studi tentang sistem peringatan dini yang berpusat pada manusia dalam menghadapi risiko tsunami di dekat lapangan untuk kota-kota pesisir Indonesia. *Emerald.Com*, 11(2), 1759–5908. <https://doi.org/10.1108/IJDRBE-10-2019-0068>
- Rahayu, H. P., Kenyamanan, L. K., Haigh, R., Amaratunga, D., & Khoirunnisa, D. (2020b). Sebuah studi tentang sistem peringatan dini yang berpusat pada manusia dalam menghadapi risiko tsunami di dekat lapangan untuk kota-kota pesisir Indonesia. *Jurnal Internasional Ketahanan Bencana di Lingkungan Binaan*, 11(2), 241–262. <https://doi.org/10.1108/IJDRBE-10-2019-0068/FULL/HTML>
- Rahmi, M., dan, L. L.-I. J. dari M., & 2020, tidak terdefinisi. (n.d.). Strategi Komunikasi Polda Sumut tentang Kegiatan Sosialisasi Proaktif Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Ijmmu.Com*. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2222>
- Randan, S., & Randan, S. (2022). Menilik Keberadaan Perempuan Sebagai Pemimpin Dalam Gereja: *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat*, 3(1). <https://doi.org/10.34307/kinaa.v3i1.54>
- Sani SSos, A., Padjadjaran Jl Raya Bandung Sumedang, U. K., Sumedang, K., Barat, J., Sani, A., Sumartias, S., Hafiar, H., & Ismail, N. (2022). Adaptasi personel humas Polda Jawa Barat terhadap komunikasi era digital. *Journal.Unpad.Ac.Id*, 7(1), 73–92. <https://doi.org/10.24198/prh.v7i1.38645>
- Saputra, E., Khair, M., ... G. T.-J. M., & 2024, tidak terdefinisi. (n.d.). PELATIHAN DIGITAL MARKETING UNTUK PRODUK ENTERPRISE KARANG TARUNA UNTUK MENINGKATKAN OMSET BISNIS. *Journal.Halalunmabanten.Id*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <https://journal.halalunmabanten.id/index.php/ijma/article/view/100>
- Sari, N. I. P., Junita, A., & Ritonga, I. M. (2021). Hubungan Kepemimpinan Melayani Terhadap Perilaku OCB dengan Pemberdayaan Pekerja dan Interaksi Atasan Bawahan Sebagai

- Pemediasi serta Gender Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.14710/jab.v10i1.36131>
- Studi, P. S.-K., & 2024, tidak terdefinisi. (n.d.). Model Liputan Televisi Terhadap Ormas Islam di Indonesia. *Kurdishstudies.Net*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <https://kurdishstudies.net/menu-script/index.php/KS/article/view/1973>
- Tarigan, C., Ginting, P., -, Y. A., Manajemen, A., & 2024, tidak terdefinisi. (N.D.-A). GAYA KEPEMIMPINAN DAN KONFLIK KERJA TERHADAP KINERJA DI BIDANG MEDIS DAN KESEHATAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA MELALUI *Radjapublika.Com*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <http://radjapublika.com/index.php/IJEBAS/article/view/1412>
- Tarigan, C., Ginting, P., -, Y. A., Manajemen, A., & 2024, tidak terdefinisi. (n.d.-b). GAYA KEPEMIMPINAN DAN KONFLIK KERJA TERHADAP KINERJA DI BIDANG MEDIS DAN KESEHATAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA MELALUI *Radjapublika.Com*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <http://radjapublika.com/index.php/IJEBAS/article/view/1412>
- Wandi, J. I., & Reflianto, R. (2018). Masalah Kesetaraan Gender, Persepsi dan Perceraian. *Justicia Islamica*, 15(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i2.1461>
- Yulianti, E. R. (2018). UPAYA KEPEMIMPINAN SPIRITUAL DALAM MENGEMBANGKAN BUDAYA MUTU DI SMA PLUS MUTHAHHARI BANDUNG. *JURNAL SCHEMATA : Pascasarjana UIN Mataram*, 7(2). <https://doi.org/10.20414/schemata.v7i2.515>
- Yulinasril, Y., Wardi, Y., ... E. M.-I. C. pada, & 2019, tidak terdefinisi. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Pengembangan Karir Personil Kepolisian di Sumatera Barat. *Atlantis-Press.Com*. <https://www.atlantispress.com/proceedings/piceeba2-18/125907950>
- Yusmanizar, Y., Djalil, N., ... Y. Y.-O. J. I., & 2023, tidak terdefinisi. (n.d.). Mengembangkan kebijakan e-government melalui platform media sosial di kota Makassar, Indonesia. *Journal.Unismuh.Ac.Id*. Diakses tanggal April 6, 2024, from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11641>
- Zheng, Q. (2023). Memulihkan kepercayaan melalui transparansi: Memeriksa dampak strategi transparansi terhadap komunikasi krisis polisi di Tiongkok Daratan. *Tinjauan Hubungan Masyarakat*, 49(2). <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2023.102296>